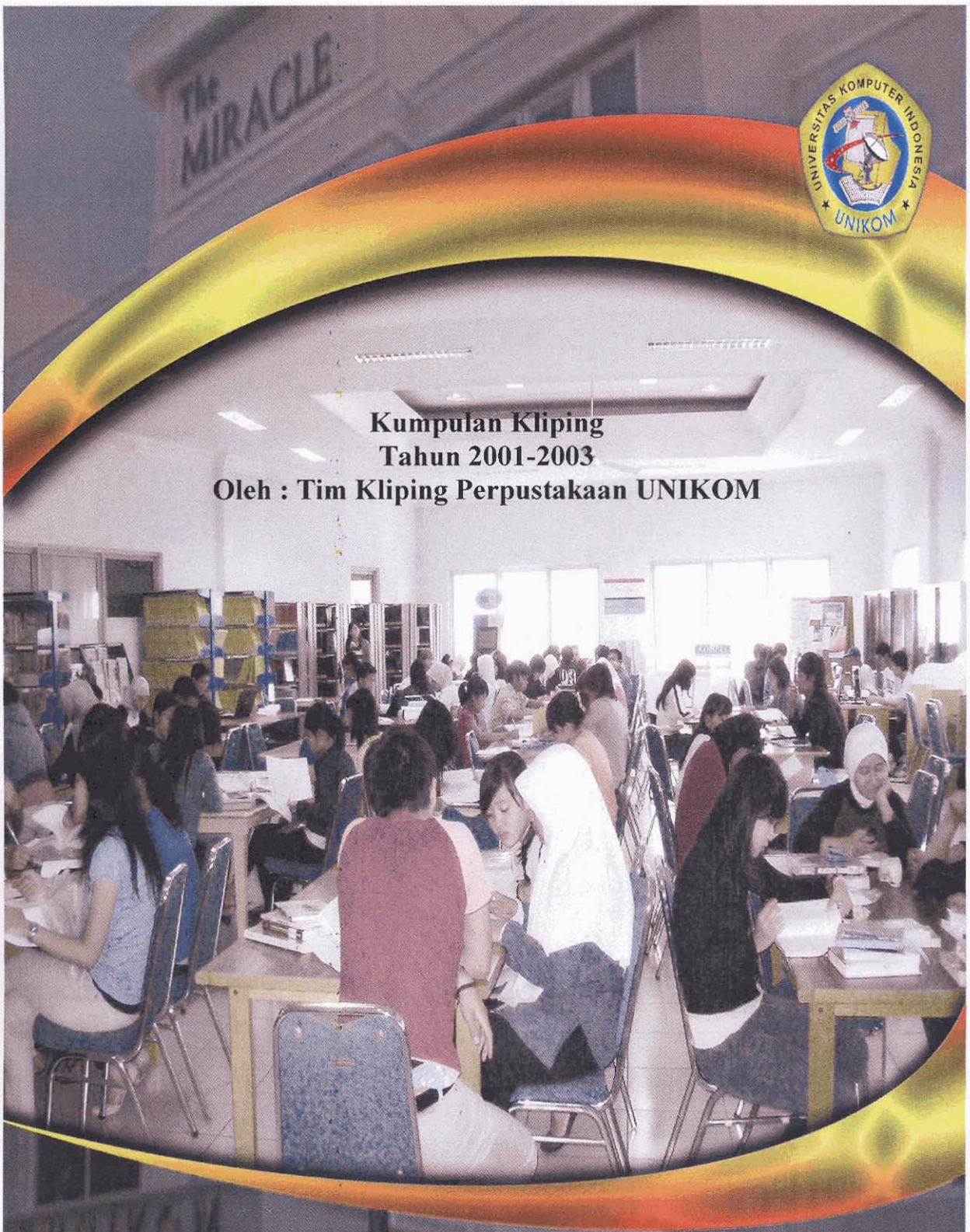


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 43 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : MARCUS - MAISIR, Lies
Subjek : WANITA / 305

Perempuan dalam Dunia Politik Afganistan

MEDIA telah membangun imaji kita tentang Afganistan ke dalam dua gambaran ekstrem: perempuan nestapa berbaju burka yang tertatih disela gunung padas di satu pihak, sementara pada pihak lain gambaran lelaki memanggul senjata, bersorban, bersepatu butut, dan berjanggut ala Osama bin Laden. Di luar itu, kita di Indonesia hampir tak punya bayangan apa-apa tentang Afganistan.

Sebagaimana disampaikan Tahmeena, aktivis perempuan Afgan RAWA yang minggu lalu berdiskusi dengan teman-teman aktivis Fatayat NU di Jakarta, realitas kehidupan warga Afgan tak sesederhana itu. Tulisan ini juga disarikan dari studi literatur serta hasil diskusi panjang via dunia virtual dengan Muhammad Riaz Khan, kepala biro *Nawa-I-Waqt*, koran bertiras tinggi berbasis di Peshawar, perbatasan Afgan dan Pakistan.

Robin Bush (Afkar, II, 1997) pernah mengemukakan tesisnya yang menarik dijadikan pegangan dalam melihat kecenderungan konservatinisme agama dan hubungannya dengan posisi perempuan dalam Islam. Menurut dia, meskipun perempuan tidak dianggap punya peranan penting dalam politik Islam, namun posisinya dalam masyarakat senantiasa diperebutkan. Terlebih bila situasi dalam keadaan krisis dan labil. Secara sepihak mereka menentukan kapan perempuan harus berada di ruang publik dan kapan harus mundur dan terkubur.

Dalam konteks Afganistan hal ini tergambar sangat jelas. Misalnya, peristiwa yang berawal dari kunjungan Raja Amanullah Khan dan Ratu Suraya ke Eropa pada akhir tahun 1927. Sekembalinya, raja memanggil anggota Loya Jirga, sejenis parlemen dalam pemerintahan tradisional Afgan dan meminta mereka melakukan reformasi, antara lain menyangkut kehadiran kaum perempuan di dunia publik. Agaknya, sebagaimana dikemukakan Leila Ahmad (*Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*), banyak pemimpin lelaki dari dunia Islam, tak terkecuali pemimpin Afganistan saat itu, merasa begitu inferior tatkala berhadapan dengan dunia Barat. Mereka menganggap adat istiadat yang mengungkung kaum perempuan, membuat mereka tampak tak berbudaya. Alih-alih mencari pasal yang lebih substansial atas realitas ketertindasan perempuan, secara simplistis mereka menyimpulkan akar masalahnya terletak pada cara kaum perempuan berpenampilan: Menggunakan burka.

◆◆◆

TENTU saja, sebagaimana diungkapkan Tahmeena, pangkal soalnya bukan itu—dan banyak perempuan Afgan sebenarnya menyukai burka karena sangat cocok dengan keadaan Afganistan yang tandus dan berdebu serta perubahan cuaca yang ekstrem dari panas ke dingin. Namun, ini menjadi masalah ketika negara memaksakan kepada kaum perempuan tanpa sama sekali mengonsultasikannya dengan pihak perempuan. Terlebih ketika dalam pemaksaan itu pihak penguasa memanipulasi realitas dari persoalan yang bersifat sosiologis kultural—semacam penggunaan pakaian seperti itu—ke persoalan teologis dengan mengatasnamakan perintah Tuhan.

Ini pula yang terjadi pada masa rezim Islam garis keras Taliban yang berlangsung pada awal abad ke-21. Kekacauan politik dan kebangkrutan ekonomi yang ditinggalan perang dengan Rusia serta perseteruan tak berkesudahan antara faksi-faksi yang bertikai, dengan sangat simplistis kesalahan ditimpakan pada kehadiran perempuan di dunia publik. Para penguasa Taliban menganggap akar masalahnnya pada kebangkrutan moral yang mereka anggap bersumber dari kebebasan dan kehadiran kaum perempuan di dunia publik. Jalan keluarnya, perempuan didomestikan kembali.

Sangat menarik (meskipun mengerikan) bagaimana perempuan dijadikan obyek dalam setiap perseteruan antara kelompok yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih modern dengan kelompok yang menghendaki konservatinisme di Afganistan. Ketika satu tahun kemudian Raja Amanullah Khan (1928) memberlakukan perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan kehadiran kaum perempuan di dunia publik, konon, Ratu Soraya mulai menanggalkan kain penutup kepalanya serta meminta hal yang sama kepada kaum perempuan Afgan. Tindakan raja, ternyata memancing reaksi keras dari kelompok konservatif agama dan mereka menggalang kekuatan dengan mengeluarka fatwa jihad melawan Amanullah Khan. Fatwa ini memaksa raja membatalkan gagasan reformasinya, tetapi kebencian terhadap raja telah telanjur bergulir. Januari 1929 terjadi pemberontakan dan raja pun diasingkan ke Italia.

Pengganti raja, Jenderal Nadir Shah, terbunuh pada tahun 1933 dan posisinya kemudian digantikan anaknya, Zahir Shah. Dalam masa pemerintahannya, kembali keberadaan kaum perempuan di dunia publik dipertaruhkan. Sebagai upaya menekan kelompok konservatif agama, Zahir Shah sengaja memarjinalkan kelompok tersebut dan memberi ruang sangat lebar bagi upaya modernisasi. Dalam situasi ini kaum perempuan mendapatkan posisinya di dunia publik. Kali ini perempuan cukup diuntungkan oleh perseteruan ini. Tahun 1959 misalnya, perempuan diizinkan memasuki perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan di luar rumah. Bahkan, pada tahun 1964 keluar kebijakan kesetaraan bagi kaum perempuan dalam parlemen, dunia pendidikan, dan profesi lainnya. Menurut Tahmeena, sebelum perang dengan Rusia, situasi perempuan cukup menggembirakan: 40 persen profesi dokter diduduki kaum perempuan, dan di dunia pendidikan mencapai 60 persen.

Tahun 1974, Daud Khan, keponakan Zahir Shah, memberontak ketika raja dalam lawatan ke Italia. Perempuan kembali menapaki jalan ke titik nadir, terutama setelah Daud Khan dan keluarganya dibunuh dan Afganistan di-

kuasai Rusia pada awal tahun 1979.

Perang dingin antara Rusia-Amerika membawa Afganistan ke dalam suasana perang antarsuku berkepanjangan. Dalam situasi itu tak bisa lain, perempuan dan anak-anak yang paling mengalami penderitaan. Dalam masa kekuasaan pemerintahan komunis ciptaan Rusia, perempuan mengalami penderitaan berlipat. Kelompok konservatif agama serta kepala-kepala suku memaksa mereka masuk ke barak penampungan. Tujuan utamanya adalah melindungi kaum perempuan dari ganasnya peperangan. Namun, di balik itu sebenarnya kaum lelaki Afgan lebih mementingkan harga diri mereka. Mereka "peduli" kepada kaum perempuan karena tak menghendaki harga diri mereka terpuruk oleh tindakan penistaan seksual tentara Rusia terhadap kaum perempuan mereka.

Berakhirnya pemerintahan komunis di Kabul tahun 1992 membawa Afganistan ke suasana wilayah tak bertuan. Para penguasa perang turut menciptakan suasana kaus di mana-mana. Lebih dari empat juta rakyat sipil, umumnya anak-anak dan perempuan, mengungsi ke negara tetangga seperti Iran dan Pakistan.

Sebagian dari anak-anak lelaki yang umumnya anak yatim korban perang masuk madrasah yang tersebar di perbatasan Afgan-Pakistan, terutama di Peshawar. Pendidikan yang terlepas dari konteks sosio-kultural Afganistan itu, menumbuhkan fanatisme sempit. Setelah cukup dewasa, mereka kembali ke tanah leluhur dan siap menjadi martir untuk peperangan panjang nan sia-sia.

Suasana chaos ini terus berlangsung hingga akhir tahun 1996 ketika kelompok Taliban muncul dengan gagasan fundamentalisme Islam yang sangat keras. Kata Taliban sendiri berasal dari kata *talib* yang berarti murid madrasah. Kurang dari satu tahun, Taliban berhasil menguasai 90 persen kekuasaan kelompok Mujahidin. Dalam alam multietnis dan lingua ini, kelompok Pastun, Tajik, Hazara, dan Turkman merupakan kelompok mayoritas di Afganistan. Sebagian besar pendukung Taliban berasal dari suku Pastun yang penganut mazhab Hanafi.

Awalnya banyak warga, terutama kaum lelaki, menyambut Taliban dengan harapan memulai hidup baru dengan suasana damai. Namun, sebaliknya bagi kaum perempuan, Taliban membawa mereka ke jurang kesengsaraan lebih dalam. Menyusul penderitaan kaum perempuan, kekecewaan membayangi masyarakat Afgan segera setelah penguasa Taliban memberlakukan apa yang mereka klaim sebagai penerapan syariat Islam.

Dalam situasi ini kelompok perempuan mengalami penistaan luar biasa: Taliban mengharamkan perempuan menikmati pendidikan, bekerja di luar rumah, dan hadir di dunia publik dengan memaksakan kepada mereka menggunakan burka. Bahkan, secara literer suara kaum perempuan pun di bungkam dengan alasan suara perempuan adalah haram.

◆◆◆

DARI Afgan barangkali kita bisa bercermin bahwa ketika gagasan penerapan syariat Islam dipaksakan dan berakhir dengan kegagalan maka seluruh kesalahan sejarah atas kegagalan suatu bangsa akan serta-merta ditimpakan pada penerapan syariat Islam. Sudah sangat jelas dampak suasana perang dan pemaksaan penerapan syariat Islam ala Taliban di Afganistan begitu menyengsarakan.

Kini selain persoalan pengungsi, situasi keseluruhan Afganistan berada di titik nadir. Negeri yang oleh kaum pengembara Cina dahulu kala disebut sebagai "jantung hati dunia" kini menjadi negara yang hampir tanpa harapan. Dan, dalam setiap situasi apa pun, perempuan bukan saja menjadi pihak yang diperebutkan melainkan juga yang paling mengalami penderitaan.

LIES MARCOES-NATSIR
Alumni IAIN Jakarta, konsultan pada Asia Foundation untuk program Islam, Jender dan Pengembangan Civil Society

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 42 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek : WANITA & POLITIK / 305

Jender dan Politik Berbasis Identitas

SUATU lokakarya penting berlangsung di Bali tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus, membicarakan mengenai jender dan politik berbasis identitas. Pertemuan difasilitasi oleh Forum Asia Pasifik untuk Perempuan, Hukum dan Pembangunan (APFWLD) bersama mitra kerjanya di Indonesia, yakni Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, serta Pusat Informasi dan Dokumentasi tentang Islam dan Hak-hak Perempuan, Rahima.

PERTEMUAN itu menghadirkan peserta dan narasumber dari India, Malaysia, Kepulauan Solomon, Jepang, Tibet, Fiji, Afganistan, Banglades, Sri Lanka, Thailand, Pakistan, Filipina, Korea, dan Indonesia. Diskusi diantar oleh Ketua Komnas Perempuan, Prof Dr Saparinah Sadli.

"Dari proses diskusi itu muncul tiga hal penting. "Yang pertama dituntut mewujudkan, membentuk dan meneruskan segala mitos, bahasa, dan kepercayaan atau agama yang merupakan perekat, yang membuat suatu golongan atau bangsa menjadi satu, adalah perempuan. Dengan demikian, pengendalian sosok, tubuh dan seksualitas perempuan menjadi sangat penting dalam proses pembentukan suatu komunitas," ujar Sekjen Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana.

"Kedua, dalam situasi di mana identitas agama, etnis, dan ras menjadi landasan dari suatu proses perebutan kekuasaan politik, maka sosok perempuan, tubuh, dan seksualitasnya menjadi pusat perhatian para pelaku politik yang sedang bertarung. Akibatnya, sosok, tubuh, dan seksualitas perempuan dijadikan arena pertarungan untuk kepentingan politik praktis.

"Ketiga, perjuangan hak-hak perempuan secara konsisten mengalami pencairan akibat politik identitas, atau paling tidak, terpecah-pecah olehnya. "Perempuan dari agama mana pun telah atau berpotensi menjadi obyek sasaran pengendalian oleh penafsir nilai-nilai fundamental dari agamanya masing-masing," tegas Kamala.

◆◆◆

DALAM pengantarnya Saparinah Sadli mengingatkan, identitas jender tanpa memandang ras, etnisitas, atau agama lebih sering menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. "Terkait dengan semua ini, maka perempuan secara sistematis didiskriminasi atas dasar interpretasi yang keliru dari kepercayaan, sosial, nilai-nilai tradisional dan faktor-faktor sosial-ekonomi."

Sebagai dampak peran jender dan terciptanya ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, identitas pun dijenderkan. "Kedua hal ini menyebabkan terjadinya ketidaktoleranan terhadap 'yang lain' atas dasar jender, etnisitas atau agama."

Saparinah melanjutkan, "Bila kita berbicara tentang identitas jender dan politik berbasis identitas, harus diingat adanya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki selain antara kelompok yang sedang berebut kekuasaan."

Meskipun perjuangan perempuan merebut hak-hak asasinya sebagai manusia juga menggunakan politik berbasis identitas, namun dalam konteks situasi di mana identitas etnis, rasial, dan agama dipolitisasi demi kepentingan politik sempit, politik berbasis identitas menjadi sangat berbahaya dan berpotensi menghancurkan kedua jender. Namun, korban pertamanya adalah perempuan. "Khususnya ketika kita saksikan bagaimana adikuasa global, pemerintah nasional yang otoriter dan kelompok militan ekstremis yang dilengkapi persenjataan mematikan, yang operasinya didukung dana multimilyar dollar dan dikelola organisasi yang canggih," tandas Saparinah.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, juga disaksikan betapa mudahnya masyarakat kita dipengaruhi para pemain politik. "Deprivasi ekonomi yang panjang, kebangkrutan politik dan alienasi kultural, tekanan psikologi dan kekosongan spiritual, membuat tetangga, kolega, bahkan keluarga kita menjadi rentan terhadap solusi termudah yang diberikan oleh pemerintah berkuasa atau oleh fundamentalis militan," sambung Saparinah.

Saparinah memaparkan, di tengah situasi yang amat sulit dalam masa transisi ini, Indonesia menghadapi berbagai konflik, kekerasan dan kekuatan sosial-politik yang saling membenci. Politik berbasis identitas telah menjadi salah satu dari kekuatan yang paling destruktif di negeri ini. Dengan demikian, proses transisi tidak hanya sulit, tetapi juga sangat menekan.

◆◆◆

PEREMPUAN di Indonesia, seperti dikatakan Saparinah, menjadi korban langsung maupun tak langsung kekerasan akibat politik berbasis identitas. Dalam kerusuhan Mei 1998, banyak perempuan Tionghoa diperkosa, sementara

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : .....
Subjek : .....

perempuan Islam di Aceh dan perempuan suku asli di Papua lebih satu dekade menjadi target penyiksaan, kesewenang-wenangan dan kekerasan seksual karena dituduh mendukung gerakan separatis.

Syariat Islam yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dalam era otonomi, juga menjadikan perempuan sebagai target pertama penerapan peraturan dari Syariat Islam. Meski demikian, peran perempuan juga menonjol dalam merajut perdamaian, memperjuangkan keadilan, dan demokrasi.

Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di berbagai tempat lain di dunia. India saat ini, menurut Urvashi Butalia dari Kali Women, India, menghadapi konflik komunal, setelah pemisahan dan pertempuran melawan Pakistan (tahun 1965, 1971, 1999). Perang terakhir menyebabkan sedikitnya 300.000 orang kehilangan tempat tinggalnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Di Kashmir, di bagian barat laut India yang berbatasan dengan Pakistan dan tujuh negara bagian di timur laut yang berbatasan dengan Cina, muncul gerakan-gerakan antinegara, militan dan sub-nasionalis. Di berbagai bagian India, terjadi konflik abadi antara kasta tinggi dan kasta rendah. Korbannya mereka yang miskin dan kasta bawah, khususnya perempuan dan anak-anak.

"Belakangan, konflik politik, etnis, militer, dan kasta bersama-sama berada dalam pertempuran internal yang dahsyat antara komunitas yang berbeda agama, khususnya Islam dan Hindu, yang di India dikenal sebagai konflik 'komunal'," tulis Butalia dalam makalahnya *Women and Communal Conflict, New Challenges for the Women's Movement in India.*

Komunalisme, menurut Butalia, merupakan ideologi patriarki yang dalam, yang menarik perempuan kembali ke rumah dan membatasi seluruh ruang gerak perempuan. Setiap konflik komunal digunakan untuk menggiring perempuan ke rumah dan kelompoknya, di mana kekerasan demi kekerasan terus berlangsung tanpa diketahui

Akan tetapi, Butalia juga mengajak semua pihak untuk merenungkan keterlibatan perempuan dalam ideologi komunal dan komunal konflik. "Apakah benar asumsi selama ini bahwa perempuan itu nonkekerasan dan tidak mendukung kekerasan dan konflik? Apakah keliru mengasumsikan persamaan pengalaman perempuan akan mengatasi perbedaan? Bagaimana dengan perempuan yang memperoleh akses pada ruang publik justru ketika terjadi konflik komunal?"

Butalia memaparkan dua hal yang bisa dipertimbangkan dalam setiap situasi. Di Kashmir, perempuan yang suaminya tewas dalam perang bisa dipaksa menjadi pelacur, namun banyak dari mereka memilih menjadi kurir pasukan keamanan demi uang dan kelangsungan hidup keluarganya.

"Tidak hanya konflik seperti ini yang menyebabkan perempuan terlibat dan memiliki akses pada kekerasan, tetapi juga melalui keadaan di mana ia menjadi janda, kesengsaraan dan kehilangan anggota keluarganya yang menyebabkan mereka mengalami pemiskinan," lanjut Butalia.

Masuknya kekerasan eksternal—seperti kekacauan dan serangan oleh pasukan keamanan atau kampanye kebencian dari partai-partai komunal—ke dalam rumah membuat posisi perempuan menjadi semakin sulit, tak hanya untuk menyatukan anggota keluarganya, tetapi juga terjadinya kekerasan di dalam rumah, yang dipandang "kurang penting" dibandingkan kekerasan eksternal.

Situasi ini ditambah dengan trauma psikologis dan tekanan yang dihadapi perempuan akibat keterlibatan mereka dalam konflik yang berlangsung: ke-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

hilangan anggota keluarganya, ketidakpastian mengenai kematian dari orang yang "dihilangkan" karena tidak ada jasadnya, tidak adanya akses pada pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Semua ini merupakan tangan yang nyata bagi gerakan perempuan di India. Secara bersamaan, mereka harus berhati-hati dengan bahasa yang digunakan, kampanye dan strateginya. Ini semua hanya bisa muncul dari kejernihan dan komitmen politik mereka.

◆◆◆

DI Jepang, seperti dikemukakan Yayori Matsui dari Violence Against Women in War Network, muncul kelompok ultranasionalis Sayap Kanan. Kelompok ini memiliki jaringan mulai dari birokrat di pemerintahan, mantan militer, media massa, budayawan, seniman, sampai masyarakat akar rumput. Mereka anti terhadap perjuangan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Salah satu tokoh yang populer dari kelompok ini adalah Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara, yang sebelumnya adalah novelis terkenal.

Ketika dilangsungkan Pengadilan Internasional untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual Militer Jepang pada Perang Dunia II di Tokyo, Desember tahun 2000, kelompok ini melalui berbagai jaringannya menuduh pengadilan itu merupakan konspirasi Barat untuk menjelek-jelakkan nama Kaisar Jepang dan menghancurkan nama Jepang di dunia internasional.

Kelompok ini juga menerbitkan buku-buku dan komik mengenai heroisme tentara Jepang dalam perang. Mereka menerbitkan buku sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah dan membentuk *Masyarakat untuk Buku Teks Sejarah Baru* (*Tsukurukai*) tahun 1997.

Kondisi ini, menurut Yayori, dipicu situasi "ekonomi busa" yang menghancurkan ekonomi Jepang awal tahun 1990-an, dan semakin stagnan ketika globalisasi meluas. Ini mengakibatkan berubahnya sistem senioritas, manajemen berdasarkan kerja seumur hidup, dan hubungan kerja sama industrial yang selama ini dibanggakan.

Jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan angka bunuh diri meningkat tajam. Jenis baru kekerasan, kriminalitas dan perubahan sosial membuat masyarakat khawatir terjadinya disintegrasi. Semua orang merasakan situasi tidak pasti. Mereka kehilangan kebanggaan menjadi orang Jepang yang selama ini dikenal maju ekonominya.

Pada saat itulah kelompok yang mulai tumbuh pada awal tahun 1970-an mengambil situasi ini untuk menancapkan pengaruhnya secara lebih luas. Mereka menuduh kelompok elite yang berkuasa korup, tidak becus dan menyebabkan kehancuran Jepang. Karena seperti menjawab keresahan masyarakat, banyak anggota masyarakat kemudian ikut bergabung. Situasi ini menurut Yayori, mirip situasi Jepang tahun 1930-an.

"Tidak hanya di Jepang nasionalisme seperti ini merebak," ujar Yayori. Di Jerman, ada kelompok neo-Nazi, di Austria ada kelompok Heider, di Perancis ada Le Pen yang sempat muncul sebagai calon Presiden Perancis. Partai Sayap Kanan juga mendapatkan kekuasaan di Belanda dan Denmark, Partai Satu Bangsa di Australia dan patriotisme di AS.

Bersama-sama dengan situasi di Selatan, Yayori mengatakan, bentuk-bentuk ekstremisme seperti ini merupakan tanggapan antara lain terhadap globalisasi ekonomi dan kekosongan kepemimpinan.

Dr Patricia Martinez dari Asia-Europe Institute University of Malay menganjurkan agar perempuan waspada terhadap identitas yang sebenarnya merupakan bentukan dan konstruksi. Nasionalisme pun merupakan komunitas bayangan yang dikonstruksi, dijaga, dipaksakan, didisiplinkan, direproduksi. Ia juga menganjurkan agar perempuan mengenali identitas komunitas, identitas politik, globalisasi, nasionalisme, negara, ruang publik dan ruang privat, ras, agama dan fundamentalisme.

Dalam dialog publik di Jakarta, Kamala menambahkan, "Secara strategis kita perlu menyadari bahwa kita tidak akan mampu memberi respons kuat terhadap ketidakadilan akibat arus fundamentalisme dan politik identitas tanpa membangun kerja bersama yang melintasi batas-batas agama, kepercayaan, suku, dan ras." (ma)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 14 / DESEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 10 / 1-5
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : TRI
Subjek / NO. KLASS : POLITIK SOSIOLOGI / 306.26

Partisipasi Aktif Anak Penting dalam Proses Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan paradigma pemikiran dan sikap manusia dewasa mengenai anak akan memberi ruang pada anak untuk menjadi manusia secara utuh, yang didengarkan pandangan-pandangannya mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka.

Partisipasi aktif anak akan menjadi awal dari suatu proses demokrasi yang murni, yang kalau berlangsung di setiap tahapan usia akan menciptakan ruang lebih luas bagi pembentukan diri sebagai warga negara yang aktif, toleran, dan demokratis.

Demikian benang merah sambutan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Sosial (Menko Kesra) Jusuf Kalla dan Kepala Perwakilan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Anak (Unicef) di Jakarta, Steven Allen, Jumat, di Kantor Menko Kesra di Jakarta, pada peluncuran laporan *The State of World's Children 2003*.

Peluncuran global laporan tahunan yang kali ini bertema "Partisipasi Anak" itu dilakukan oleh Direktur Eksekutif Unicef Carol Bellamy di Mexico City, Meksiko, tanggal 11 Desember.

Seperti dikemukakan Steven Allen, anak dan orang muda memiliki visi, impian, dan harapan-harapannya sendiri yang didasari atas kenyataan-kenyataan mereka sendiri dan tidak bisa diwakilkan kepada orang dewasa.

Namun, di berbagai tempat di dunia, seperti tercermin dalam survei pendapat yang dilakukan oleh Kantor Regional Unicef di kawasan Asia-Pasifik, lebih separuh responden menyatakan suara mereka dan teman-temannya tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas mengenai persoalan-persoalan yang akan berdampak kepada mereka.

Jusuf Kalla menambahkan, jumlah penduduk Indonesia yang termasuk dalam usia anak menurut PBB (sampai usia 18 tahun) berjumlah 36,86 persen dari sekitar 210 juta penduduk. Ia menguraikan masalah angka kematian bayi, gizi, kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak yang tetap menjadi perhatian pemerintah.

Menko Kesra juga mengakui persoalan serius yang dihadapi anak-anak di Indonesia saat ini, seperti perdagangan anak dan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Memampukan

Menurut laporan setebal 123 halaman yang memuat contoh-contoh mengenai partisipasi anak di berbagai negara di dunia itu, partisipasi anak memerlukan dorongan dan upaya untuk memampukan mereka dalam menyatakan pandangannya terhadap masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi mengandung arti bahwa orang dewasa mendengarkan pandangan-pandangan anak. Partisipasi aktif melalui cara komunikasi yang beragam akan menjamin kebebasan anak mengekspresikan diri, dan mempertimbangkan pandangan mereka ketika harus mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Gagasan tentang partisipasi anak di tingkat internasional dikemukakan dalam Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang Anak pada bulan Mei tahun 2002. Lebih dari 400 anak, mewakili lebih dari 150 negara menghadiri Children's Forum yang membahas delapan masalah utama yang mereka angap penting, yakni eksploitasi dan penganiayaan, perlindungan dari perang, partisipasi anak, kesehatan, HIV/AIDS, kemiskinan, dan pendidikan.

Peluang untuk berpartisipasi aktif yang paling jelas bagi anak muda saat ini adalah mendengarkan suara mereka dalam persoalan HIV/AIDS dan memberikan informasi tepat yang dapat dipahami sesuai tahap perkembangan daya pikir mereka.

Dari survei di 40 negara terlihat, lebih dari 50 persen kaum muda berusia 15-24 tahun memiliki pandangan yang sangat keliru tentang cara penyebaran HIV/AIDS.

Namun demikian, mendengar pendapat anak tidak selalu berarti mendukung seluruh pandangan mereka. Makna yang sesungguhnya adalah mengajak mereka berdialog, bertukar pendapat, serta memberi kesempatan kepada anak untuk belajar mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka secara konstruktif.

Makna sosial dari proses memberi dan menerima dalam konsep partisipasi adalah mendorong anak ikut bertanggung jawab dalam proses pembentukan dirinya selaku warga negara yang aktif, toleran, dan demokratis.

Partisipasi otentik dimulai dari diri anak dan remaja, dimana mereka sendirilah yang menetapkan persyaratan dan kondisinya berdasarkan realitas mereka. Namun, anak-anak memerlukan informasi, dukungan, dan kondisi yang memberi kesempatan mereka berpartisipasi secara benar.

Partisipasi anak merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan *Millenium Development Goals* dan *A World Fit for Children* untuk mengubah dunia yang berantakan dan penuh konflik dengan mempercepat pelaksanaan demokrasi. (TRI/MH)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

ANAK-ANAK DUNIA

Dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) meluncurkan laporan tahunan "State of the World's Children" Rabu (11/12).

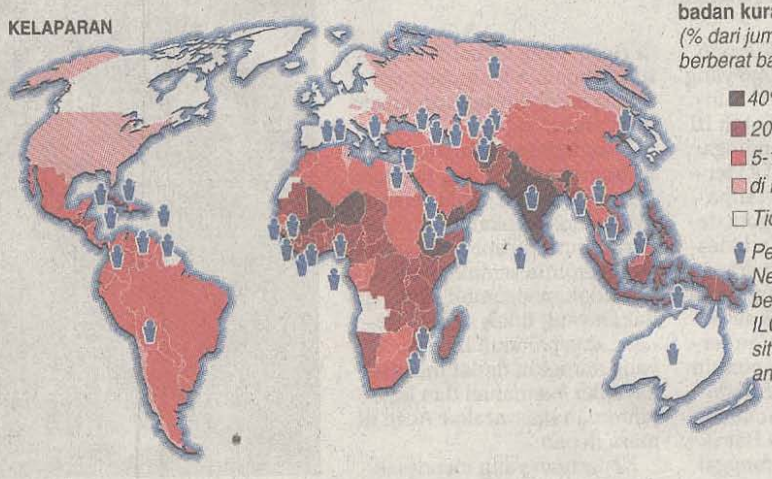
PENDIDIKAN



Partisipasi di Sekolah
(% dari jumlah anak 1995-2001)

- *di bawah 50%*
- *50-74%*
- *75-89%*
- *90% atau lebih*
- *Tidak ada data*
- *Perbedaan akibat jender. Anak perempuan yang bersekolah jumlahnya kurang dari 40%, atau perbedaan anak perempuan dengan laki-laki yang bersekolah lebih dari 10%.*

KELAPARAN



Anak-anak dengan berat badan kurang
(% dari jumlah anak balita berberat badan kurang 1995-2001)

- *40% atau lebih*
- *20-39%*
- *5-19%*
- *di bawah 5%*
- *Tidak ada data*
- *Pekerja Anak. Negara-negara yang belum meratifikasi ILOC 182 tentang situasi terburuk pekerja anak.*

REUTERS

Sumber: UNICEF

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 22 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUSANTO, AB
Subjek / NO. KLASS : SOSIOLOGI / 301

Paradigma Baru "Community Development"

TUJUH terbentuk dan delapan kertas kerja dipresentasikan pada seminar "Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Kerangka Pembangunan Sumber Daya Lokal dan Otonomi Daerah" di Universitas Indonesia belum lama ini. Berkaitan dengan eksploitasi SDA, mereka mengibaratkan daerahnya sebagai padang perburuan. Selama perburuan berlangsung hingga selesai masyarakat setempat hanya memperoleh manfaat yang minimal dengan peran yang sangat marjinal, hanya menjadi penonton dan penggembira belaka. Dan ketika binatang buruannya habis, daerah mereka ditinggalkan begitu saja.

Fenomena ini sungguh menarik, karena di satu sisi perusahaan-perusahaan besar merasa telah memberikan "banyak" untuk membantu masyarakat sekitar dengan kucuran dana yang tidak sedikit. Sebaliknya masyarakat sekitar merasa tidak mendapatkan "apa-apa". Berarti program *community development* yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tidak mencapai sasarannya.

Padahal banyak perusahaan yang secara bersungguh-sungguh telah merancang program *community development*, dan tentu mereka sangat kecewa ketika diberitahu bahwa program-program yang mereka laksanakan tidak memberikan hasil sesuai dengan keinginan. Terlebih lagi dalam konteks otonomi daerah serta bergaungnya semangat reformasi, telah menjadikan *community development* menjadi tema yang kerap diangkat menjadi isu sosial (dan politik).

Paradigma baru

Banyak istilah yang dilontarkan untuk memperbarui istilah ini, seperti *community empowerment developing program, community based resources management, community based development management*. Tetapi, yang lebih penting adalah perubahan paradigmanya. Karena program yang sebenarnya telah dipersiapkan secara serius, tampaknya hanya mampu memuaskan segelintir orang saja. Bahkan ditengarai selama ini hanya menjangkau beberapa tokoh masyarakat/adat setempat.

Harus disadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang suportif.

Berdasarkan pandangan ini pihak perusahaan harus mengeksplorasi hubungan mereka dengan komunitasnya. Kemudian mengindentifikasi titik-titik yang dianggap kritis dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dari sini dirumuskan bagaimana perusahaan merespon kebutuhan serta masalah-masalah yang mereka hadapi.

Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan adalah melakukan analisa kebutuhan komunitas (*community need analysis*). Dalam melakukan analisa kebutuhan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), dan bukan sekadar keinginan (*wants*) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisa harus dilakukan secara mendalam agar dapat mengggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Musyawarah adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat dimasukkan dalam proses eksplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan pihak perusahaan, pemda, dan masyarakat. Musyawarah merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam program *community development* yang dijalankan, sebagai bagian dari *transfer ownership* program. Inti *community development* harus mengandung unsur pemberdayaan, dan tidak mendidik mereka sebagai "pengemis" atau "pemalak."

Transparansi dalam pelaksanaan program harus menjadi landasan utama, yang menuntut akuntabilitas para pelaksana program, dari kalangan internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga kasus-kasus salah sasaran seperti yang terjadi dalam program jaring pengaman sosial Bank Dunia tidak "menular", dan justru memicu ketidakpuasan yang dapat melahirkan masalah baru. Secara khusus disiapkan sistem audit untuk memantau, mengawasi dan mengevaluasi berjalannya program dari waktu ke waktu.

Kerangka selengkapnya, ditunjukkan dalam *JCG Community Development Cycle*, yang mengawali pelaksanaan program dengan *Community Need Analysis*, kemudian pengembangan konsep yang melibatkan komunitas sasaran untuk menumbuhkan rasa memiliki, proses sosialisasi, penyajian sesuai dengan kebutuhan, pemanfaatan tenaga setempat, kepekaan dalam pelaksanaan program, sosialisasi kepada pihak eksternal, dan terakhir dilakukan audit untuk memantau keseluruhan program.

Untuk memberikan kemudahan, seluruh rangkaian pelaksanaan aktivitas program *community development* dapat dituangkan secara sistematis dalam akronim DISCUSS, dari kata *Development, Involve, Socialize, Cater, Utilize, Sensitive* dan *Socialize*.

Kegiatan pelaksanaan *community development* dimulai dengan *development*, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil *community needs analysis*. Dalam tahap ini juga harus disertakan komunitas yang menjadi sasaran pengembangan (*involve*). Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (*socialize*) program ini kepada seluruh komunitas, sehingga mereka merasa memiliki program ini dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilannya. Dalam tahap-tahap ini musyawarah memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program. Yaitu, *cater*, yang berarti program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan jangan bersikap "sok tahu", serta memperhatikan dan *utilize*, yang berarti sedapat mungkin melibatkan te-

Hari / Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

naga kerja setempat untuk melaksanakan proyek. Misalnya, dalam pembangunan gedung sekolah, sedapat mungkin menyerap tenaga kerja setempat. Berikutnya harus ada kepekaan *(sensitive)* dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang dalam komunitas. Dan yang terakhir adalah *socialize,* dalam arti sosialisasi program *community development* kepada pihak luar melalui aktivitas PR.

Komunitas dan korporasi

Komunitas dan perusahaan (korporasi) diusahakan berada dalam sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat memacu derak roda perekonomian, yang membawa komunitas menuju taraf hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian harus ada keseimbangan keuntungan komunitas *(community benefits)* dengan keuntungan bisnis *(business benefits),* yang dapat diperoleh dari percampuran antara filantropi murni dan pendekatan penajaman bisnis *(business sponsorship approach)* yang melahirkan filantropi strategis *(strategic philanthropy).* Pemerintah daerah bertindak sebagai katalisator dalam proses ini.

Bentuk kepedulian untuk memperkuat dan mengembangkan komunitas ini, harus dilaksanakan dengan program *community development* yang tepat, dengan melakukan revisi dan redefinisi program *community development* dalam sebuah pendekatan holistik.

◆ **AB Susanto,** *Managing Partner The Jakarta Consulting Group.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 9 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : A / 1 5 - 9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SULARTO, St
Subjek / NO. KLASS : PSIKOLOGI SOSIAL / 302

Membangun Moralitas Bersama

SEJARAH pertentangan Galileo dengan Gereja sering hanya ditafsirkan sebatas ketertutupan agama terhadap sains. Padahal inti persoalannya adalah pertanyaan tentang kebenaran. Apakah sais memberi kita landasan untuk memperoleh kepastian mengenai dunia? Apakah sains bisa membawa kita untuk sampai ke kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu menurut seorang Karlina mulai menjadi perdebatan hangat ketika sains dinilai berhasil menduduki puncak tertinggi pencapaian kebudayaan manusia pada awal abad ke-20.

Menurut panelis Karlina Leksono, pernyataan-pernyataan sains memiliki kekuatan karena mempunyai struktur yang rasional dan isi yang empiris. Pernyataan itu benar atau salah hanya bisa diketahui melalui pengujian dalam hubungannya dengan fakta atau tidak, melalui prediksi atas apa yang kemudian ternyata benar. Sebuah pernyataan itu obyektif, tidak bergantung kepada siapa pencetusnya. Pernyataan itu mempunyai bentuk yang khas, karena ada premis dan konklusi, dan itulah bentuk rasional penjelasan ilmiah.

Dari sains manusia belajar bahwa dunia tidak pernah sama lagi setelah mahakarya ilmuwan abad ke-20 berhasil membinasakan dengan seketika 170.000 jiwa, serta membiarkan puluhan ribu lainnya mati perlahan-lahan pada bulan Agustus 1945. Tetapi, dari sains kita belajar juga, bahwa kehidupan seorang manusia saja sangat berharga karena bermilyar-milyar tahun diperlukan untuk bisa menghadirkannya di Bumi. Pertanyaannya, bisakah dua pelajaran dari sains ini memulihkan kapasitas manusia untuk tergerak secara etis dan emosional, secara individual maupun kolektif? Setidaknya sains semestinya bisa mengajak kita merenungkan bagaimana tetap setia mengritisi tindakan kita, dan mau mengubahnya setiap kali tahu kita salah.

◆◆◆

KASUS Galileo sebagai contoh, berhadapan dengan langkah-langkah kerja sains, menunjukkan keterlambatan agama-agama dalam merumuskan kaidah moralnya. "Agama selalu terlambat, karena sifatnya sekunder, yakni merumuskan dan bereaksi setelah kejadian di mana teologinya harus memberikan penjelasan dalam terang iman," kata teolog Tom Jacobs.

Berkaitan dengan itu, muncul sejumlah soal menyangkut agama (pengalaman iman) dan hasil sains, seperti kloning, dulu bertahun-tahun terjadi perdebatan masalah evolusi, dan belakangan ini masalah euthanasia. Bangunan moralitas untuk masyarakat modern seperti apa yang harus dikembangkan? Seorang saintis, ilmuwan, akan menunjukkan langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti yang dijelaskan Karlina. Sambil mengakui keterbatasannya, ilmuwan merasa bukan tanggung jawabnya kalau hasil sainstis itu digunakan untuk membunuh, seperti kasus bom atom atau nuklir.

Beranjak dari ketidakterbatasan pengembangan sains, bisa saja hasil itu akan "berbenturan" dengan agama, dengan sifat khas teologi selalu sekunder. Apa yang terjadi pada "pengampunan" Gereja Katolik atas Galileo setelah 500 tahun pernyataan itu diungkapkan ke luar, menunjukkan "keterbukaan" agama-agama. Lantas di manakah posisi sains yang dalam hal-hal tertentu dianggap kelewat campur tangan dalam urusan Tuhan dalam hal *creatio* seperti dalam kelahiran anak manusia? Diskusi tidak sempat membedah persoalan "klasik" itu, tetapi paling tidak disadari bersama, bagaimana moralitas demi kemaslahatan manusia adalah titik temu yang harus diusahakan baik oleh sains maupun agama. Dan di sini tempatnya, tarik ulur, proses penyadaran bersama antara moralitas agama-agama dan moralitas sains bertemu dalam mengembangkan komunitas kemanusiaan.

Masyarakat risiko, demikian kata kunci dari panitia dalam menggambarkan pengalaman langsung masyarakat menghayati hidupnya sehari-hari. Dalam suasana demikian setiap individu dihadapkan pada kemungkinan dan pilihan, dan mereka menghadapi kenyataan masa depan adalah penuh risiko. Kemajuan teknik, keberhasilan sains dan kedokteran, serta ingin tahu semua ilmu, telah mengubah cara berpikir: setiap orang dapat merekayasa dunia pengetahuannya sendiri, sesuai dengan kemampuannya, selera, dan tanggung jawabnya. Akibatnya tidak ada lagi pandangan religius tentang manusia dan dunia, yang mampu menata dan mempersatukan pengetahuan manusia, dan sebaliknya, cara berpikir para ilmuwan memantang mereka yang bicara mengenai Allah.

Membangun moralitas bersama ini sebaiknya dimulai dari anak-anak, juga dalam praksis pendidikan. Tetapi, menurut penglihatan Karlina, di sekolah kurang diajarkan pendidikan etika dan moral; yang disampaikan adalah hasil ilmu pengetahuan, dan kurang ditekankan bagaimana proses penemuan-penemuan ilmiah. Padahal justru di sana letak kekuatan sains, yakni pada langkah-langkah yang selalu dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

◆◆◆

MEMBANGUN moralitas tidak hanya terjadi dalam hal sains dan teologi, tetapi juga dalam hal pencarian jatidiri setiap individu di tengah kecederungan manusia yang hedonis, dalam dunia penuh ketidakpastian dan berubah amat cepat sekarang.

Serba ketidakpastian masa depan, menurut Alois A Nugroho, dihadapi dengan cara bermacam-macam. Strategi budaya Jawa menggambarkannya dengan "ilmu jiwa Kramadangsa" ajaran Ki Ageng Suryomentaram. Digambarkan dalam ilmu itu, irama orang Jawa *mulur mungkret* dan bahwa hidup otentik ditandai oleh enam-sa, yakni *sakpenake*, *sakbutuhe*, *sakcukupe*, *sakperlune*, *sakmesthine*, dan *sakbenere* (seenaknya, sebutuhnya, seperlunya, semestinya, dan sebenarnya). Kalau hal ini benar, maka "mumpungisme" atau egoisme hedonistis sebagai antisipasi atau reaksi terhadap lingkungan yang ditandai ketidakpastian, bukanlah gejala umum tetapi hanya kekecualian.

Reaksi egoistis dan hedonistis terhadap lingkungan yang tidak pasti, bila dilihat dari ajaran Suryomentaram, adalah reaksi dimensi "Kramadangsa" saja dan bukan responsi dari dimensi "manusia tanpa ciri" sebagaimana diharapkan Suryomentaram. Tetapi secara empiris, tidak ada jaminan bahwa manusia juga manusia Jawa, akan bereaksi dengan dimensi "manusia tanpa ciri", dan tidak dengan dimensi Kramadangsa. Globalisasi bisnis, mengarahkan jalur

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

tunggal pada apa yang dirintis AS melalui kedigdayaan media yang canggih, dikhawatirkan menyebarluaskan "moralitas pasar".

Dalam moralitas pasar, *sakpenake* menjadi *sakpenak-penake* (kenikmatan sebesar mungkin), *sakbutuhe* menjadi *sakpengine* (stimulasi pasar lebih berpengaruh), *sakcukupe* dan *sakperlune* menjadi *sakakehe* (sebanyak-banyaknya), *sakmesthine*, dan *sakbenere* menjadi *sakkarepe*.

Dalam moralitas pasar kebutuhan harus dipenuhi menjadi keinginan dan sejauh mungkin menjadi permintaan dengan daya beli memadai. Iklan mengartikan kebutuhan publik agar menjadi keinginan spesifik terhadap produk-produk yang ditawarkan.

Agar keinginan itu dapat diubah menjadi permintaan saat ini, ditawarkan cara kredit. Dalam paham demikian, menjadi soal siapakah sesamaku? Siapakah tetanggaku? Diperlukan waktu untuk membangun moralitas bersama, bukan hanya kebaikan komunitarian, melainkan kebaikan umum kemanusiaan, yang dimulai dengan pertanyaan siapakah sesamaku?

Bagaimana dua aspek di atas, masyarakat risiko menghadapi kenyataan perkembangan sainstis yang bergerak cepat dan teologi yang sekunder, bersama dengan moralitas pasar yang mementingkan egoisme rasional dengan upaya membangun moralitas bersama?

Pertanyaan itu dijawab agar terus-menerus dikembangkan moralitas bersama, di antaranya dengan cara bagaimana sikap yang secara tradisional dimiliki masyarakat dapat menjadi perasional kembali. Bertoleransi terhadap orang dengan adat, agama, cara hidup lain artinya dia juga mau memperhatikan hal-hal yang bagi yang lain peka. Hal mana berarti bersedia memberikan ruang bagi komunitas-komunitas lain dan membawa diri secara beradab dalam segala situasi sebagaimana diajarkan tradisi.

Moralitas bersama adalah pertemuan-pertemuan antara nilai-nilai tradisi itu dan mengembangkan dalam sebuah kenyataan konkret yang didialogkan terus-menerus. ◆

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 29 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : FATURAHMAN, TUBAGUS ERIF
Subjek / NO. KLASS : ASIMILASI (SOS101061) / 303.4

Negara Multi-etnis dan Resolusi Konflik

WOODROW Wilson, seorang presiden negara multi-etnis; Amerika Serikat, meragukan terciptanya negara multi-etnis yang stabil. Kecuali kasus Amerika, demikian kata Walzer, pluralisme masyarakat dan budaya hanya akan bertahan dalam rezim tirani. Begitu sosok seorang tiran runtuh, maka runtuh pulalah pluralisme yang ada. Yugoslavia adalah sampel sempurna. Keraguan negara multi-etnis telah ada sejak abad 17 sampai abad 20. Salah satu tokohnya adalah Furnival dan Smith yang memperkenalkan teori *new pessimism*. Bagi Furnival, masyarakat yang memiliki etnis berbeda tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai, tetapi harus dipisah.

Ada beberapa pandangan mengapa konflik di masyarakat terjadi. Menurut pandangan radikal atau reformis, konflik terjadi karena adanya perubahan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat yang semula *equilibrium* menjadi *disequilibrium* akibat adanya pendatang baru yang berupaya memasuki hierarki, posisi, dan sistem sosial yang ada. Dalam konteks ini, transmigrasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab konflik. Lain lagi pandangan fungsionalis. Bagi fungsionalis, konflik terjadi bukan karena hadirnya pendatang, tetapi karena terjadi perubahan-perubahan yang kompleks dalam perangkat-perangkat sosial yang tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Perubahan ini membawa konsekuensi perebutan sumber kebutuhan yang terbatas dan terbukanya konflik.

◆◆◆

DALAM kasus Indonesia, segala konflik yang ada, baik berdasar asumsi radikal maupun fungsionalis, mengerucut pada konflik etnis. Konflik etnis merupakan gejala sosial politik permanen dalam dunia modern dan hampir tidak ada negara yang bebas dari permasalahan itu. Dalam kasus akut, konflik dapat mengarah pada pembunuhan atau kekerasan destruktif. Dalam penelitian yang dilakukan antara tahun 1945-1980, korban jiwa akibat konflik etnis lebih banyak jumlahnya daripada kombinasi konflik lainnya.

Renner berpendapat, konflik etnis dalam sebuah negara terjadi karena pemetaan atau pembagian wilayah yang dilakukan kolonialis tanpa melihat kepentingan kultural. Akibatnya, bangsa yang sama dan semula satu menjadi terpisah-pisah dan tergabung dengan bangsa lain yang asing dengan kultur mereka, bahkan bertentangan dan kemudian terjebak dalam konflik permanen. Sejalan dengan Renner adalah Ayoob yang melihat banyaknya konflik terjadi di negara dunia ketiga akibat warisan kolonialisme. Karena itu, bukan suatu hal yang mengejutkan jika sekelompok masyarakat atau bangsa mengkoyak-koyak negaranya sebagaimana negara telah mengkoyak-koyak mereka.

Namun, bukan jawaban bermakna jika kemudian negara dibiarkan tercerai berai hanya karena berdasarkan asumsi sejarah dan pesimisme multi etnis. Beberapa pendapat masih melihat adanya kemungkinan eksistensi negara multi etnis, termasuk Indonesia.

Ada lima model regulasi konflik etnis.

Pertama, partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lain. Model ini jarang sekali digunakan, terjadi hanya ketika sebuah etnis benar-benar hidup terpisah oleh garis demarkasi negara.

Kedua adalah dominasi satu etnis terhadap etnis lain, biasanya melalui kekerasan atau tindakan diskriminatif.

Ketiga, melalui proses asimilasi. Model ini adalah bentuk halus dan maju dari model kedua, namun dilakukan dengan cara yang alami. Keempat, konsolidasi. Sistem ini mengakui eksistensi setiap perbedaan yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan-perbedaan itu. Dalam model ini, kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi diputuskan berdasarkan konsensus dan kompromi.

Kelima, memiliki keserupaan dengan model keempat, yaitu pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini mungkin lebih tepat disebut sinkretisme. Negara, dalam hal ini, berusaha mengakomodasi dan mengapresiasikan berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan dilakukan secara adil. Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam model terakhir ini.

Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui desentralisasi kekuasaan (sistem federasi) atau otonomi kultural. Renner menyarankan agar negara membiarkan setiap etnis melaksanakan otonomi kultural yang didasarkan atas prinsip personal dari setiap kultur. Biarkan setiap etnis, suku, menerapkan otonomi kulturalnya. Penyeragaman akan melahirkan penolakan yang kuat. Otonomi kultural akan berhasil baik jika negara menerapkan sistem federasi.

Dengan alasan untuk mempermudah administrasi, Pemerintah Indonesia berusaha menyeragamkan sistem dan struktur seperti yang diterapkan di Jawa sekalipun tidak dikenal dalam kebudayaan lainnya seperti pembentukan RT, RW, kepala dusun, lurah atau kepala desa, dan lain-lain.

Bagi warga Papua, misalnya, sistem seperti itu dianggap meredusir kewenangan kepala suku dan menghilangkan adat istiadat yang selama ini mereka anut kuat. Struktur kekuasaan dan kewenangan terpaksa dibagi antara struktur versi pemerintah dengan struktur versi adat yang tidak jarang menimbulkan konflik yang menjurus pada sikap anti-pemerintah pusat. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami *ethnocide* atau proses kehilangan identitas baik karena kebijakan politik maupun sistem dan institusi sosial-politik yang ada.

Renner ditentang oleh Hefner. Bagi Hefner (*State, Nation, and Ethnity in Modern Indonesia*), model Renner akan gagal jika diterapkan dalam kasus Indonesia yang memiliki banyak etnis. Indonesia memiliki banyak kerumitan.

Pertama, penerapan sistem federal masih mendapat tantangan akibat kebijakan masa lalu yang banyak menolak ide-ide Barat. Selain itu, federalisme bukan merupakan jaminan akan terhentinya konflik etnis dan terciptanya perdamaian sebab pemahaman orang terhadap federalisme begitu sempit di mana negara bagian hanya boleh ditempati etnis tertentu saja.

Kedua, berbagai macam gerakan separatisme dalam kenyataannya, kecuali RMS dan Papua, bukan dilandasi pada persamaan etnis, tetapi pada ideologi, seperti pemberontakan DI/TII. Dominasi etnis jawa dalam berbagai sistem pemerintahan tidak menimbulkan keinginan etnis lain untuk melepaskan diri. Kendati saat ini muncul berbagai tuntutan kemerdekaan dari etnis tertentu, tuntutan itu tidak didasarkan pada kebencian terhadap etnis Jawa secara mutlak.

Versi lain resolusi konflik ditawarkan Galtung yang membuat tiga model berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain; *peace keeping, peace building* dan *peace making*. **(lihat Tabel)**

◆◆◆

PEACE keeping amat perlu diterapkan guna meredam kon-

flik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Peace building* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antarpihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu ada lima yang harus diperhatikan dalam tahapan ini. Interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status, dukungan dari lingkungan sosial, [redacted] secara intim (bukan k[redacted] menyenangkan kedua pihak dan ada tujuan yang hendak dicapai bersama. Guna mendukung keberhasilan, interaksi harus disertai sikap saling mem[redacted], ada tujuan besar yang [redacted]k diraih, pembangunan ekonomi, pembangunan kepercayaan, upaya saling memahami.

Peace making adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa [redacted]tode yang dilakuk[redacted]lam tahapan ini [redacted]ama, melalui kek[redacted]n atau *power*, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara, termasuk rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik. Sayangnya, Indonesia tengah mengalami delegitimasi atau penurunan kewibawaan. Dalam kasus negara tidak memiliki legitimasi pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) yang berupaya menyelesaikan konflik dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama kendati secara hukum, "ilegal", seperti *Interactive Conflict Resolution.*

◆ **Tubagus Erif Faturahman,** *mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Studi Kekhususan Hubungan Internasional. Spesifikasi: Pengkajian Strategis, Keamanan, dan Diplomasi.*

TABEL KERANGKA RESOLUSI KONFLIK VERSI GALTUNG

Masalah	Strategi	Target
		Kelompok
Kekerasan	*Peace keeping* (aktivitas militer)	"Pejuang" atau para-militer
Pertenangan Kepentingan	*Peace making* (aktivitas politik)	Pemimpin/tokoh
Struktur sosial - ekonomi dan sikap negatif	*Peace building* (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)